

Nita Darma Sari, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.....

JURNAL
**EKONOMI
PEMBANGUNAN**

Journal of Economic & Development
HAL 101 - 112

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI SUMATERA SELATAN**

**Oleh :
Nita Darma Sari**

ABSTRACT

This research is aimed to describe some variables influence the Vehicle Tax Revenues. Analysis used in this research was Quantitative analysis and formulated in a Quadratic Regression Model. The output shows that variables influence vehicle tax revenues were per capita income, vehicles sums, vehicles tax tariff and inflation simultaneously significant to Vehicle Tax Revenues in coefficient correlation = 0,999 (99,9%). The output regression was positive and significant to vehicles sums and vehicles tax tariff, whereas per capita income and inflation were insignificant as statistic.

Keywords : vehicle sums, vehicle tax tariff, inflation.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Salah satu penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, jenis pajak Kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 terdiri dari : a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi : a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak

bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk sebagai sumber pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah dalam usaha membiayai pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Propinsi Sumatera Selatan pada mulanya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menunjuk wakilnya di daerah dan dilakukan secara terpisah. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Sumatera Selatan, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Komdak Sumatera Selatan dan Kepala Perum Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang dengan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (SAMSAT).

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Tahun 1994/1995 – 2003 (Dalam Ribuan)

Tahun	Pajak Kendaraan bermotor		(%)
	Target	Realisasi	
1994/1995	12.000.000.000	16.141.186.540	134,51
1995/1996	17.800.000.000	20.245.409.473	113,74
1996/1997	23.000.000.000	23.683.007.830	102,97
1997/1998	26.000.000.000	24.870.046.995	96,65
1998/1999	31.000.000.000	31.665.473.044	102,15
1999/2000	37.400.000.000	43.122.659.019	115,30
2000	43.265.000.000	47.064.576.282	108,78
2001	66.800.000.000	77.486.625.144	116,00
2002	68.000.000.000	87.027.784.826	127,98
2003	78.000.000.000	115.945.271.067	148,65

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

(%) : Prosentase realisasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang cukup baik. Target yang dicapai dalam setiap tahun anggaran selalu terlampaui atau pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, hanya pada tahun anggaran 1997/1998 target tidak terlampaui atau realisasi lebih kecil dari target yang ingin dicapai, hal ini karena adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut; “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan .”

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan bagian dari penerimaan pemerintah. Adapun definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak

dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. (Mangkuesubroto, 1997 : 181)

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar (Mangkoesubroto, 1993 : 2), yaitu :

- a. Peranan Alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bias optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- b. Peranan Distribusi, yakni pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c. Peranan Stabilisasi, yakni pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.

Setiap negara membutuhkan dana, untuk menyelenggarakan pemerintahan salah satu sumber dana yang lebih diandalkan pemerintah Indonesia adalah pajak. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang. Pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak tertentu adalah orang atau Badan yang menjadi wajib pajak. Pemerintah dapat menetapkan berbagai jenis pajak yang tarifnya dapat bervariasi, antara lain disebabkan adanya perbedaan pada aspek teknis.

Beberapa indikator yang digunakan dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak daerah antara lain PDRB, Inflasi, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, pendapatan perkapita dan tarif pajak (Antoni, 2001 : 54).

Penelitian Terdahulu

Indra Gunadi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kendaraan dan Tarif Pajak Kendaraan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Selatan” periode tahun 1995/1996 sampai dengan 2000, berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan regresi berganda diperoleh koefisien sebesar 113218,82 untuk variabel jumlah kendaraan bermotor dan 36869,589 untuk variabel tarif pajak kendaraan bermotor. Nilai koefisien ini menyatakan besar kecilnya pengaruh jumlah kendaraan dan tarif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pada hasil perhitungan menunjukkan bahwa bila jumlah kendaraan bermotor bertambah sebanyak 1 unit, akibatnya akan menaikkan nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 113.218,82 rupiah. Untuk variabel tarif pajak bila bertambah 1 rupiah, maka nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan bertambah sebesar 36.869,589 rupiah.

Selamat Bamim (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan” periode tahun 1990/1991 sampai dengan 1999/2000, berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan regresi dan analisis data dengan pendekatan *Two Stage Least Square* (TSLS) melalui bantuan komputer Progran Shazame, hasilnya menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara signifikan dengan $R^2 = 0,9658$. Berdasarkan besaran elastisitasnya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan secara statistik yaitu

variabel Produk Domestik Regional Bruto dan inflasi, sedangkan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan ini terbatas dalam ruang lingkup Propinsi Sumatera Selatan. Artinya penulis hanya membahas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta permasalahan yang berhubungan dengan variabel tersebut.

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Data tersebut berupa data time series dari tahun anggaran 1994/1995 sampai 2003, dimana untuk menunjang data tersebut penulis juga melakukan studi kepustakaan sehingga dengan data yang tersedia inilah penulis menganalisa permasalahan yang ada.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis secara kualitatif ini bersifat deskriptif (menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan yang ada serta variabel-variabel lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut).

Penulis merumuskan hubungan fungsional faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor, yaitu :

$$PKB = f (Y_k, Tr, Q_k, Inf)$$

Keterangan :

- PKB = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ;
- Y_k = Pendapatan Per Kapita
- Tr = Tarif pajak ;
- Q_k = Jumlah Kendaraan bermotor;
- Inf = Inflasi

Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan regresi berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e_i$$

Keterangan,

- Y = Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor ,
- X_1 = Pendapatan Per Kapita
- X_2 = Tarif Pajak ;
- X_3 = Jumlah Kendaraan Bermotor ;
- X_4 = Inflasi ;
- e_i = Error term ;
- a = Intercep konstan
- b_1, \dots, b_3 = Parameter

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Total Pajak Daerah dan Pendapatan asli Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan pos penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pajak daerah pada setiap tahun anggaran cenderung meningkat menyebabkan pajak daerah sebagai penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Selatan. Adapun jenis pajak yang dominan memberikan sumbangan terhadap pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah dan juga terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat kita lihat dari Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Total Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Jutaan Rupiah)

Tahun	PKB	Total Pajak Daerah	Total PAD	Kontribusi Terhadap Total Daerah	Kontribusi Terhadap Total PAD
1994/1995	16.141,2	39.560,7	54.411,6	40,8	29,7
1995/1996	20.245,4	55.097,5	71.889,3	36,7	28,2
1996/1997	23.683,0	60.656,3	83.380,1	39,0	28,4
1997/1998	24.870,0	68.005,1	90.815,4	36,6	27,4
1998/1999	31.665,5	47.315,3	55.256,0	66,9	57,3
1999/2000	43.122,7	70.795,8	78.387,1	60,9	55,0
2000	47.064,6	104.273,7	119.909,2	45,1	39,3
2001	77.486,6	164.856,1	219.257,2	47,0	35,3
2002	87.027,8	228.449,4	376.476,1	38,1	23,1

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, berbagai edisi

Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar pada sektor pajak daerah jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini terlihat dari perhitungan kontribusi pada Tabel 2 di atas. Pajak kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan penerimaan yang pada tahun 1994/1995 hanya sebesar Rp 16.141,2 juta menjadi sebesar Rp115.945,3 juta di tahun anggaran 2003. Begitu juga pada penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dari Rp 39.560,7 juta menjadi Rp 310.116,2 juta. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. Di tahun 1994/1995 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah sebesar 40,8 persen dan mengalami penurunan di tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 1997/1998. Namun mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 1998/1999 hingga menjadi 66,9 persen dan kembali menurun di tahun 1999/2000 hingga 2003 tetapi tetap memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 1994/1995 sebesar 29,7 persen dengan perkembangan yang berfluktuasi seperti yang terjadi pada kontribusi pajak daerah. Rata-

rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total pajak daerah sebesar 44,85 persen, sedangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 35,08 persen.

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Propinsi Sumatera Selatan akan dibahas pada bab ini. Pengolahan data yang dilakukan dalam bab ini dengan menggunakan analisis statistik yaitu dengan menggunakan analisis regresi. Penggunaan analisis regresi dalam penelitian ini digunakan lebih dari dua variabel, yang terdiri dari empat variabel independen yaitu pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Selatan, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Selatan, proksi rata-rata tarif pajak per kendaraan bermotor, inflasi dan satu variabel dependen yaitu besarnya atau nilai dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu 1994/1995 sampai dengan 2003.

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan data dan memperkecil tingkat kesalahan. Peralatan yang digunakan dalam analisis ini yaitu dengan menggunakan program komputer SPSS. Dalam analisis ini tidak hanya melihat pengaruh antar variabel, tetapi juga melihat hubungan positif dan negatif dan besarnya peranan masing-masing variabel terhadap perubahan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk dapat mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen serta peranan variabel terhadap perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor dilakukan teknik analisis regresi berganda.

Setelah dilakukan perhitungan dengan teknik analisis regresi berganda antara pendapatan perkapita, jumlah kendaraan, proksi rata-rata tarif kendaraan bermotor dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} Y = -3,007 + 0,01446X_1 + 1,294X_2 + 1,057X_3 + 0,01522X_4 \\ \text{SE} \quad (0,669) \quad (0,021) \quad (0,044) \quad (0,019) \quad (0,013) \\ \text{Fhit} = 850,850 ; D_w = 2,127 ; \text{Adj } R^2 = 0,997 ; r = 0,999 \end{array}$$

Keterangan :

Y = Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1994 – 2003.

X1 = Pendapatan Perkapita di wilayah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1994-2003.

X2 = Jumlah Kendaraan Bermotor yang tercatat membayar PKB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1994 – 2003.

X3 = Proksi Rata-rata Tarif Per Kendaraan Bermotor Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1994 – 2003.

X4 = Laju Inflasi kota Palembang Tahun 1994 – 2003

Besarnya pengaruh pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai R-squared (R^2) yaitu sebesar 0,997. Angka tersebut mempunyai arti bahwa hanya 99,7 persen dari perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor dijelaskan oleh variabel pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi, sedangkan 0,3 persen lainnya dijelaskan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan persamaan regresi berganda diperoleh koefisien sebesar 0,01446 untuk variabel pendapatan perkapita, sebesar 1,294 untuk variabel jumlah kendaraan bermotor, untuk variabel rata-rata tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 1,057 dan untuk variabel inflasi sebesar 0,01522. Nilai koefisien ini menyatakan besar kecilnya pengaruh pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada hasil perhitungan menunjukkan bahwa bila pendapatan perkapita bertambah 1 persen, maka akan menaikkan nilai penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sebesar 0,01446 persen, bila jumlah kendaraan bermotor bertambah 1 persen, akibatnya akan menaikkan nilai penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sebesar 1,294 persen. Untuk variabel rata-rata tarif pajak bila bertambah 1 persen, maka nilai penerimaan Pajak kendaraan bermotor akan bertambah sebesar 1,057 persen. Untuk variabel inflasi bila bertambah 1 persen maka nilai penerimaan Pajak kendaraan bermotor akan bertambah sebesar 0,01522 persen.

Untuk menguji ketepatan masing-masing koefisien regresi digunakan pendekatan dua arah yaitu dengan test hipotesa t (t test). Persamaan regresi di atas dijelaskan secara parsial untuk masing-masing variabel independent sebagai berikut :

1. Uji hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita akan mempengaruhi nilai penerimaan Pajak Kendaraan bermotor secara statistik dinyatakan sebagai berikut :

$$H_0: X_1 = 0 ; H_a: X_1 \neq 0$$

Pegujian dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan derajat kebebasan $(n-5)=5$ dan tingkat signifikan 5% diperoleh t tabel sebesar 2,571, sedangkan dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 0,676. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa t statistik (t hitung) lebih kecil dari t tabel dengan demikian hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, berarti variabel pendapatan perkapita tidak begitu berpengaruh terhadap nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera selatan.

Pendapatan perkapita tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor karena lambatnya kenaikan pendapatan per kapita dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 9,38 persen, hal ini menunjukkan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat yang belum merata, sehingga meningkatnya pendapatan per kapita tidak begitu berarti mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Uji hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi nilai penerimaan Pajak Kendaraan bermotor secara statistik dinyatakan sebagai berikut :

$$H_0: X_2 = 0 ; H_a: X_2 \neq 0$$

Pegujian dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan derajat kebebasan $(n-5) = 5$ dan tingkat signifikan 5% diperoleh t tabel sebesar 2,571, sedangkan dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 29,164. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa t statistik (t hitung) lebih besar dari t tabel. Dengan demikian hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, berarti variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

3. Uji hipotesis yang menyatakan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi nilai penerimaan Pajak kendaraan Bermotor secara statistik dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$H_0: X_3=0 ; H_a: X_3 \neq 0$$

Pengujian dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan derajat kebebasan $(n-5) = 5$ dan tingkat signifikan 5%, maka diperoleh t tabel 2,571, sedangkan dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 55,543. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa t statistik (t hitung) lebih besar dari t tabel, dengan demikian hipotesa nol (H_0) ditolak, sedangkan hipotesa alternatif (H_a) diterima yang berarti variabel tarif pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh terhadap nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

Peningkatan yang terjadi pada tarif pajak kendaraan bermotor akan menambah jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor, begitu juga sebaliknya.

4. Uji hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi akan mempengaruhi nilai penerimaan Pajak Kendaraan bermotor secara statistik dinyatakan sebagai berikut :

$$H_0: X_4=0 ; H_a: X_4 \neq 0$$

Pegujian dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan derajat kebebasan $(n-5) = 5$ dan tingkat signifikan 5% diperoleh t tabel sebesar 2,571, sedangkan dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 1,190. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa t statistik (t hitung) lebih kecil dari t tabel dengan demikian hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, berarti variabel inflasi tidak begitu berpengaruh terhadap nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera selatan

Inflasi tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor karena dengan meningkatnya inflasi maka harga kendaraan bermotor akan naik, sehingga daya beli konsumen untuk membeli kendaraan bermotor menurun.

Untuk melihat apakah hasil estimasi model penelitian bermakna secara teoritis dan statistik, digunakan beberapa kriteria pengujian.

- a. Uji Kriteria Statistik menyangkut pengujian dengan menggunakan teori statistik, antara lain uji F, uji t dan R^2 . Apabila pengujian statistik ini sesuai dengan kriteria yang ada, maka hasilnya dapat digunakan sebagai prediksi.
- b. Uji Kriteria Ekonometri dilakukan dengan menguji pelanggaran-pelanggaran atas asumsi klasik ekonometri.
- c. Uji Gejala Multikolinieritas dilakukan dengan mendeteksi hubungan sempurna antar variabel yang tercermin dari nilai-nilai r^2 (corelation matrix of coeficien). Jika $r^2 > R^2$ maka bisa disimpulkan terjadi multikolinieritas. Dari data hasil didapat $r^2 > R^2$, maka model tidak mengalami multikolinieritas.

- d. Uji Gejala Autokorelasi ini dilakukan dengan membandingkan nilai D-W hitung hasil dari pengolahan model dengan nilai D-W dari tabel (nilai du dan dl). Dari hasil output terlihat D-W hitung (2,127) dan D-W tabel ($du=2,414$ dan $dl=0,376$), atau $0,376 < 2,127 < 2,414$, maka artinya pengujian tidak bisa disimpulkan.
- e. Uji Gejala Heterokedasitas yaitu terdapatnya gejala heterokedasitas dalam model mengakibatkan model menjadi tidak signifikan. Berdasarkan uraian terdahulu dari data hasil, terdapat variabel bebas yang memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel atau tidak signifikan, artinya model bebas gejala heterokedasitas.

Uji Koefisien Regresi Secara Serentak

Setelah kita mengetahui pengaruh yang berarti atau tidak berarti antara variabel-variabel independen yaitu pendapatan per kapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak dan inflasi dengan variabel dependen yaitu nilai penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera Selatan, maka kita juga akan mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen tersebut secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh secara serentak dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen tersebut digunakan pengujian secara serentak. Pengujian ini disebut dengan pengujian signifikan secara menyeluruh untuk memperkirakan garis regresi, yaitu apakah variabel dependen berkorelasi atau berhubungan secara linier terhadap variabel-variabel independen secara bersama-sama.

Uji mengenai ketepatan koefisien regresi digunakan pendekatan uji signifikan dengan menggunakan kriteria uji F melalui penggunaan peralatan analisis varian.

Uji hipotesis yang mengatakan bahwa jumlah pendapatan perkapita, jumlah kendaraan, tarif pajak dan inflasi akan mempengaruhi nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan, dengan alternatif ada salah satu yang menyimpang arah secara statistik, hipotesa ini dinyatakan sebagai berikut :

$$H_0 : X_i = 0 ; H_a : X_i \neq 0$$

Uji f dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat signifikan 5%, maka diperoleh F tabel sebesar 5,19, sedangkan dari hasil perhitungan didapat nilai F statistik (F hitung) sebesar 850,850. Karena F statistik lebih besar dari F tabel yaitu $850,850 > 5,19$ berarti hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian secara bersama-sama variabel-variabel independen yaitu pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi mempunyai pengaruh terhadap nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan.

Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar 0,999 (99,9%) berarti variabel dependen yaitu nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan variabel-variabel independen yaitu pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Berarti pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor dan inflasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan sebesar 99,9%.

Dengan diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 0,997, maka dapat dikatakan bahwa variasi variabel nilai penerimaan Pajak kendaraan bermotor Propinsi

Sumatera Selatan adalah 99,7 %, dijelaskan oleh variabel pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, tarif kendaraan bermotor dan inflasi, sedangkan sisanya sebesar 0,3% dijelaskan oleh variabel lain.

Prospek Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang termasuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti terlihat dalam komponen-komponen Pendapatan Daerah dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data empiris dapat diketahui bahwa prospek penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sepuluh tahun terakhir, target yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran selalu terlampaui atau pada setiap tahunnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan. Dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2003 pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target yang diinginkan. Hanya pada tahun 1997/1998 target tidak terlampaui atau realisasi lebih kecil dari target yang ingin dicapai dikarenakan adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997.

Namun pelayanan pegawai perpajakan masih kurang memuaskan karena masih ada kecenderungan pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas. Pegawai perpajakan hanya mengejar target yang diinginkan namun tidak meningkatkan pelayanannya, hendaknya penerimaan yang meningkat harus diikuti dengan pelayanan yang lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Variabel bebas yang terdiri dari pendapatan perkapita, jumlah kendaraan bermotor, rata-rata tarif per kendaraan dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan tingkat signifikan 5 persen ($\alpha = 5\%$) serta derajat kebebasan ($df = n - k = 5$), maka di dapat nilai F tabel sebesar 5,19 dan F hitung = 850,850 > F tabel.

Besarnya nilai koefisien determinasi R^2 adjusted sebesar 99,7% proporsi variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variabel terikat dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 0,3% dijelaskan oleh variabel lain. Pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari koefisien pendapatan per kapita sebesar 0,01446, jumlah kendaraan bermotor sebesar 1,294, rata-rata tarif perkendaraan sebesar 1,057 dan inflasi sebesar 0,01522. Keempat variabel bebas ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Selatan, terlihat dari koefisien korelasi sebesar $R = 99,9\%$.

Saran

1. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi, maka perlu adanya penelitian lanjutan dengan menambah variabel lain dan memperluas daerah penelitian sehingga penerimaan Pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat lebih baik dan analisisnya lebih lengkap.
2. Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tugas utama bagi aparat perpajakan, dalam hal ini Dipenda beserta instansi yang terkait. Dengan demikian apabila usaha peningkatan tersebut tercapai, maka hal ini merupakan suatu indikator keberhasilan dari pegawai atau instansi yang bersangkutan, untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara intensif mengenai tugas yang di bebankan kepada masing-masing petugas. Hal ini karena masih ada kecenderungan kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.
3. Adanya tarif pajak kendaraan bermotor secara progresif bagi yang mempunyai kendaraan lebih dari satu akan lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraannya tepat pada waktunya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsad, Mawardi, "Analisis Ketimpangan Ekonomi Regional di Sumatera Selatan", *Tesis Program Pasca Sarjana universitas Sriwijaya*, Palembang, 2003.
- Arsyad, Lincoln, **Ekonomi Pembangunan**, *STIE YKPN*, Yogyakarta, 1999.
- Arsyad, Lincoln, **Pengantar perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**, *BPFE*, Yogyakarta, 1999.
- Bamim, Selamat, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan", *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya*, Palembang, 2002.
- Darwin, John, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Daerah Kasus Propinsi Sumatera Selatan", *Tesis Pascasarjana Universitas Sriwijaya*, Palembang, 2002.
- Dipenda Propinsi Sumatera Selatan, "Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan", **DIPENDA** Propinsi Sumatera Selatan, 2003.
- Eryus, Ak, "Dampak Aktivitas Kendaraan Bermotor Terhadap Lingkungan", *Dalam Jurnal Manajemen Transportasi, Sekolah Tinggi Manajemen Taranspor Trisakti*, Vol 01. Jakarta Timur, 1999.
- Gujarati, Damodar, **Ekonometrika Dasar**, Erlangga, Jakarta
- Gunadi, Indra, "Pengaruh Jumlah Kendaraan dan Tarif Pajak Kendaraan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Selatan", *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*, Palembang, 2002.
- Ismail, Zainuddin, "Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan", *Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan*, Sumatera Selatan, 2003.
- Jhingan, M.L. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

- Kuncoro, Mudrajat. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Erlangga, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta
- Mangkue Subroto, Guritno, **Ekonomi Publik**, BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Musgrave, Richard, **Keuangan Negara Dalam teori dan Praktek**, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Sukirno, Sadono, **Pengantar Teori Mikro Ekonomi**, PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sukirno, Sadono, **Pengantar Teori Makro Ekonomi**, PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Suparmoko, Irawan, **Ekonomika Pembangunan**, BPFE, Yogyakarta, 1990.
- Suparmoko M, **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- Suparmoko M, **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Susetyo, Didik, **Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**, Materi Orasi Ilmiah, STIE , Palembang, 2004.
- Susetyo, Didik, "Fiscal Need and Fiscal Capacity In Autonomy Era", *Journal Of The Faculty Of Economics*, Vol.XVIII, No.2, Bulan September, 2003.
- Susetyo, Didik, "Analisis kapasitas Pajak (*Tax Capacity*) dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Sriwijaya* No.2, 1998.
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat. Jakarta, 2000.
- Taufiq, Abukosim, "Respon Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume II, No.1, 2004.
- Zahari, Ms, "Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jambi", *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya*, Palembang, 2001.